



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JAKA SUGIYANTA
2. Jabatan : DIREKTUR KOMERSIL, PENGEMBANGAN BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
3. NHK : 747801

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **4.325.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 692 m2/180 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 809 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **573.700.000**

1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, HONDA ASREA GRAND Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
6. MOTOR, VESPA LX 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **110.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.109.039.717
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.117.739.717
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.117.739.717

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.